

TAJUK RENCANA

Menyambut Pesta Demokrasi Saat Pandemi

DUA hari kita mendapat tontonan bagaimana meriah dan ramainya para calon pemimpin daerah yang hendak mengikuti kontestasi, saat mendaftarkan diri ke KPU. Hampir dipastikan para paslon berangkat dengan diikuti rombongan. Bukan hanya elite dan massa partai pendukung namun juga dengan pelbagai keunikan bahkan atraksi.

Meski Mendagri sudah mengingatkan agar pasangan calon (paslon) tidak membuat kerumunan (KR, 4/9), faktanya hampir di seluruh daerah muncul kerumunan. Tak pelak kekhawatiran akan munculnya klaster pilkada pun kian memuncat tinggi. Apalagi Pilkada 2020 ini akan diselenggarakan di 270 daerah di seluruh Indonesia.

Paslon dan pendukung seperitnya abai. Meski Mendagri sudah menunjukkan teguran keras kepada beberapa petahana yang mengabaikan *social and physical distancing* (KR, 4/9). Seakan, teguran itu "tidak menakutkan". KPU telah menerbitkan Peraturan KPU No 6 Tahun 2020 tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Non-alam Covid-19, yang di antaranya mengatur bila seluruh tahapan pilkada disesuaikan dengan protokol kesehatan. Bahkan Mendagri Tito Karnavian meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak ragu memberikan teguran atau sanksi tegas kepada calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan dengan mengemukakan terus menerus di media. Tujuannya jelas warga akan menilai paslon yang namanya berulang disebut melakukan pelanggaran.

Memang, di dalam ilmu periklanan pengulangan pesan suatu iklan dapat menyebabkan perubahan dalam pengetahuan, sikap dan perilaku konsumen (Kardes, 2001 : 162). Namun peneliti juga sepakat bahwa pengulangan tersebut maksimal dilakukan hanya 3 kali. Dan selebihnya akan mubazir.

Namun apakah sistem dan strate-

gi ini akan berhasil untuk membuka tabir paslon yang banyak melakukan pelanggaran? Rasanya *jauh panggang dari api*. Dalam Pilkada 2018 lalu, beberapa tersangka kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mencalonkan diri dan menang. Sekalipun sudah diumumkan bila calon tersebut adalah tersangka KPK.

Kekuasaan acap melenakan. Sehingga untuk meraih kursi empuk tidak *sungkan* menghalalkan segala cara. Apa yang tergambar dalam pendaftaran paslon yang jelas mengabaikan adanya pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 adalah langkah licin menyiasati aturan yang bisa dicari celahnya.

Sebagai paslon yang sudah resmi terdaftar sebagai kandidat, sejatinya mereka memiliki kewajiban moral untuk menjadi teladan. Saat ini tentu saja, khususnya teladan taat aturan masa pandemi. Dan untuk menanggung suara rakyat saat ini paslon juga elite partai pendukung harus menunjukkan perhatian, kepedulian dan empatinya pada masyarakat. Mengapa?

Kita memasuki pesta demokrasi saat pandemik. Setelah pendaftaran, potensi pengumpulan massa akan semakin besar. Maka inilah saatnya paslon 'mengerem' nafsu menunjukkan jumlah pengikut yang paling banyak dengan pengumpulan massa besar-besaran seperti di masa lalu. Dalam pesta demokrasi kali ini adalah saatnya paslon peduli untuk melindungi rakyat agar penularan virus bisa diantisipasi. Agar kehadirannya untuk merebati hati rakyat tidak justru menghadirkan klaster baru dan sejenisnya.

Elite partai termasuk paslon harus memberi pemahaman bila pesta ini tidak sekadar ritual. Namun ada makna kemanusiaan yang dalam, menyejahterakan kehidupan bangsa. Yang tentunya dilakukan tanpa dengan menabrak aturan. □



Pikiran Pembaca

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email pikiranpembaca@gmail.com. Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

Peningkatan Kompetensi Guru SMK

UPAYA peningkatan kompetensi guru SMK melalui penyelarasan sistem pembelajaran sekolah dengan standar dunia usaha/dunia industri (DUDI) sangatlah diperlukan. Dalam hal ini pemerintah selalu mendukung upaya tersebut yaitu melalui kemitraan strategis dan penyelarasan dengan DUDI, sehingga diperoleh peningkatan kualitas sistem pembelajaran sekolah menengah kejuruan.

Pemerintah pada tahun ini melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Balai Besar Pengembangan Penjamin Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) dan Dunia Usaha/Dunia Industri memberikan kesempatan kepada guru-guru SMK untuk meningkatkan/menguatkan kompetensinya dengan mengikuti pelatihan Program Upskilling dan Reskilling Guru Kejuruan SMK yang berstandar industri.

Pelatihan ini akan dilaksanakan secara blended learning/kombinasi daring dan luring. Pelaksanaan secara luring akan tetap menerapkan protokol kesehatan secara maksimal sebagai respon terhadap pandemi Covid-19. Pengampun pelaksanaan program adalah Direktorat

Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri dan Balai Besar Pengembangan Penjamin Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) bekerja sama dengan Dunia Usaha Dunia Industri yang relevan.

Sasaran program pelatihan ini diprioritaskan bagi guru-guru SMK yang memiliki latar belakang pendidikan/mengajar kompetensi keahlian kejuruan pada bidang prioritas manufaktur dan konstruksi, ekonomi kreatif, pelayanan keramahan (hospitality) dan pelayanan sosial (care service). Batas usia dari peserta pelatihan ditentukan berusia kurang dari 50 tahun per 30 Juni 2020.

Para guru SMK sebagai calon peserta pelatihan dapat melakukan pendaftaran program Upskilling dan Reskilling Guru Kejuruan SMK tahun 2020 ini melalui tautan gk.belajar.kemdikbud.go.id dengan menggunakan akun SIMPKB masing-masing guru. Dan seluruh pembiayaan pelaksanaan pelatihan telah dianggarkan melalui DIPA Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri tahun anggaran 2020. □

Ali Anton Senoaji, SMKN 3
Yogya.

SP 2020, Fondasi Membangun Indonesia

Wantutriyani

banyak 51,36 juta penduduk Indonesia telah ikut berpartisipasi, pendataan SP lanjutan yang awalnya dijadwalkan Juli pun dengan terpaksa harus diundur September. Metode pendataan yang awalnya diskenarioakan akan dilakukan secara wawancara *door to door* kepada setiap penduduk dimodifikasi sedemikian rupa agar dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan risiko Covid-19. Modifikasi yang dilakukan adalah de-



Sensus penduduk digelar Badan Pusat Statistik (BPS) setiap sepuluh tahun sekali di tahun dengan akhiran angka nol. Dalam pelaksanaannya, Sensus Penduduk (SP) 2020 merupakan sensus penduduk ke-tujuh yang dilaksanakan di Indonesia. SP tahun ini menerapkan *combine metode*, yaitu menggunakan data administrasi kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai data dasar dalam pelaksanaannya. Hal ini merupakan titik awal dari perwujudan Satu Data Kependudukan Indonesia sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019.

Evaluasi

Berdasarkan data BPS, proyeksi jumlah penduduk di Indonesia 2019 adalah 267 juta. Diproyeksikan meningkat menjadi 269,6 juta jiwa pada 2020. Data tersebut merupakan hasil proyeksi SP 2010. Melalui Sensus Penduduk 2020 ini akan kembali dihitung jumlah seluruh penduduk Indonesia secara *de facto* dan *de jure* yang akan digunakan sebagai alat proyeksi pertambahan jumlah penduduk tiap tahunnya.

Data yang dihasilkan SP 2020 nantinya juga akan digunakan sebagai bahan evaluasi pemerintah dan menjadi fondasi dalam perencanaan pembangunan di berbagai bidang. Data yang akurat sangat memiliki peran penting untuk digunakan dalam pengambilan keputusan terkait program pemerintah. Bila pemerintah tidak memiliki data yang akurat tentu saja perencanaan dan kebijakan yang diambil justru meleset alias tidak tepat sasaran. Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas awal 2020 menyatakan, data merupakan komoditas paling penting yang dibutuhkan negara.

Pandemi Covid-19 membuat rangkaian kegiatan sensus tidak berjalan lancar sesuai skenario awal. Usai Sensus Penduduk Online (SPO) diperpanjang hingga akhir bulan Mei dengan hasil se-

ngan membagi kriteria wilayah berdasarkan metode pengumpulan datanya, yang terbagi menjadi Zona 1, Zona 2, dan Zona 3.

Zona 1 merupakan wilayah *Drop Off Pick Up* (DOPU) dengan cara menyerahkan dokumen kuesioner kepada penduduk kemudian mengambilnya ketika semua pertanyaan yang ada dalam kuesioner telah selesai diisi. Zona 2 merupakan wilayah *Non Drop Off Pick Up* (Non-DOPU) dengan melibatkan pengurus satuan lingkungan setempat untuk membantu petugas sensus dalam melakukan verifikasi lapangan mengenai data penduduk di wilayahnya. Se-

mentara Zona 3 merupakan zona khusus untuk wilayah Papua dan Papua Barat dengan melaksanakan Sensus Penduduk secara wawancara langsung kepada penduduk.

Petugas Lapangan

Ketiga zona tersebut diterapkan dengan menyesuaikan status risiko wilayah untuk setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Selain itu, BPS juga mewajibkan seluruh petugas lapangan yang bertugas untuk melakukan *rapid test* guna memastikan kesehatan serta diwajibkan tetap mematuhi protokol kesehatan saat di lapangan : menggunakan masker ataupun *face shield*, membawa *handsanitizer*, serta menjaga jarak satu sama lain minimal 1,5 meter.

Di tengah keterbatasan yang ada saat ini, bukan menjadi alasan bagi BPS untuk ragu dalam melaksanakan sensus penduduk. BPS mengharapkan terwujudnya sinergi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, pengurus satuan lingkungan setempat, hingga tokoh masyarakat untuk menyelesaikan SP 2020.

Sukses tidaknya hajat besar sepuluh tahunan ini juga tidak lepas dari partisipasi seluruh penduduk Indonesia. Seluruh penduduk Indonesia wajib tercatat dan tidak ada yang terlewat demi pembangunan bangsa yang lebih baik. Terima kedatangan petugas sensus di rumah Anda, bantu kami untuk mencatat Indonesia. □

*) **Wantutriyani STR Stat, Statistisi**
di Badan Pusat Statistik Kota
Yogyakarta.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirim artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Petani, Pahlawan Perekonomian Nasional

Opik Mahendra

jalankan. Tetapi di sektor pertanian aktivitas usaha tani tetap harus berjalan dengan rambu-rambu yang benar *work on field*.

Kinerja bidang pertanian di sektor ekspor juga membanggakan. Ekspor pertanian di April 2020 mencapai USD 0,28 miliar atau tumbuh 12,66 % (y-o-y). Kenaikan ekspor didapat dari empat subsektor unggulan : perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan.

Upaya lain yakni dengan menggerakkan Pasar-Pasar Tani dan Stasiun Terminal Agribisnis (STA) yang ada di sentra-sentra komoditas pertanian dan memperbaiki penyerapan produksi pertanian yang ada. Pemasaran dan informasi kebutuhan konsumen khususnya di perkotaan bisa terbantu melalui platform pemasaran di sektor jasa distribusi dan logistik yang tujuannya agar masyarakat dapat mengakses bahan pangan berkualitas dengan harga terjangkau di tengah menurunnya daya beli.

Insentif

Insentif bagi petani saat pandemi didorong berupa insentif benih, peningkatan anggaran guna mensubsidi kebutuhan pupuk, asuransi petani termasuk pembiayaan atau keringanan kredit bagi petani. Petani dalam usaha taninya pasti membutuhkan input berupa modal, baik berupa dana segar maupun sarana produksi. Apalagi jika petani mengalami risiko kerugian dalam proses usahatani-nya termasuk dalam kondisi *social / physical distancing*.

Aksesibilitas terhadap permodalan juga menjadi per-

masalah paling mendasar yang sering dihadapi petani. Keterbatasan modal juga membuat kuantitas dan kualitas hasil yang didapat petani tidak maksimal. Permasalahan modal ini juga menjadi penyebab utama banyaknya petani yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Hanya sekitar 15% petani yang mengakses kredit di bank. Mayoritas sebesar 52% masih mengandalkan modal sendiri, kerabat, dan lembaga keuangan nonbank lainnya. Sementara itu, 33% petani lainnya mengandalkan kredit usaha rakyat (KUR). Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemahaman petani pada produk keuangan yang tersedia memang masih rendah. Hadirnya Kredit Usaha Tani (KUT) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di rasa belum maksimal. Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor pertanian 2019 masih di bawah 7%. □

*) **Opik Mahendra SP MSc, Kepala Seksi Bina Usaha, Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov Jateng**

Pojok KR

Praktik politik uang pilkada, sulit dihilangkan

-- **Uang memang selalu menggoda**

Pembelajaran daring perlu kreativitas guru

-- **Tuntutan dan tantangan guru**

KKN UMY berdayakan UMKM batik 'Pesisiran'

-- **Ada kepedulian orang muda pada batik**

Berabé

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio : KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indarini. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No 5, Purwokerto, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto. Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.

Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha. Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Arsul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. **Romy Sugiantoro SPd, SE, MM. Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mullahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Drs Sihono HT, Agung Purwandono. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrk23@yahoo.com, iklankrk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'. Rp 65.000,00, Iklan Umum/Display... Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluar... Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris). Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%